

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Implementation of Social Rehabilitation Program for Beggar by Social Services of Palangka Raya City

Fitriani^{1*}
Mita Sari²
Arafat³

¹Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

*email: fitriani@umpr.ac.id

Kata Kunci:
Implementasi Program
Rehabilitasi Sosial
Pengemis

Keywords:
Program Implementation
Social Rehabilitation
Beggars

Abstrak

Permasalahan pengemis di Kota Palangka Raya menjadi salah satu isu sosial yang kompleks, mencerminkan ketimpangan sosial dan kegagalan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam upaya menangani pengemis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan, termasuk pegawai Dinas Sosial, pendamping sosial, dan pengemis yang pernah mengikuti program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial yang mencakup pendataan, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, dan pendampingan sosial masih menghadapi berbagai kendala. Partisipasi pengemis yang rendah, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, jumlah pendamping sosial yang terbatas, serta kesulitan dalam reintegrasi sosial menjadi tantangan utama. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan tidak sepenuhnya efektif karena terbatasnya kesempatan kerja dan dukungan pasca-rehabilitasi. Meskipun demikian, beberapa pengemis berhasil menjalani rehabilitasi dan hidup mandiri. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kapasitas fasilitas rehabilitasi, jumlah pendamping sosial, pendekatan yang lebih holistik, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat guna meningkatkan efektivitas program. Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, program rehabilitasi sosial dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengemis di Kota Palangka Raya.

Abstract

The problem of beggars in Palangka Raya City is one of the complex social issues, reflecting social inequality and the failure of an inclusive social protection system. This study aims to analyze the implementation of the social rehabilitation program run by the Palangka Raya City Social Service in an effort to deal with beggars, using a qualitative descriptive approach. This study collected data through interviews, observations, and documentation from various informants, including Social Service employees, social assistants, and beggars who had participated in the program. The results of the study indicate that the social rehabilitation program which includes data collection, mental coaching, skills training, and social assistance still faces various obstacles. Low participation of beggars, limited rehabilitation facilities, limited number of social assistants, and difficulties in social reintegration are the main challenges. In addition, the skills training provided is not fully effective due to limited job opportunities and post-rehabilitation support. However, some beggars have successfully undergone rehabilitation and live independently. This study recommends improvements in the capacity of rehabilitation facilities, the number of social assistants, a more holistic approach, and stronger economic empowerment to increase the effectiveness of the program. It is hoped that with these steps, the social rehabilitation program can have a more significant impact on beggars in Palangka Raya City.



PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan fenomena yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu persoalan sosial yang cukup kompleks adalah keberadaan pengemis. Keberadaan pengemis bukan sekadar gangguan ketertiban umum, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan gagalnya sistem perlindungan sosial yang inklusif. Masalah ini menuntut perhatian serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Di berbagai kota besar di Indonesia, pengemis sering kali menempati ruang publik seperti pasar, persimpangan jalan, tempat ibadah, dan lokasi wisata. Keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Ketimpangan sosial yang melahirkan kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial dasar. Maka, menangani pengemis tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan penertiban, melainkan memerlukan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan martabat sosial.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Palangka Raya meski merupakan ibu kota provinsi dengan pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat, Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan pengemis yang muncul di ruang publik. Menurut data Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2024, hanya tercatat 3 orang pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui program luar panti. Namun, angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, di mana masih banyak pengemis yang beraktivitas setiap hari dan bahkan berasal dari luar daerah.

Kebijakan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012, yang berisi tentang penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial telah meluncurkan program rehabilitasi sosial sebagai upaya penanganan yang bersifat jangka panjang. Program ini tidak hanya berfokus pada penertiban semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan melalui pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan mental-spiritual, hingga reintegrasi sosial. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi para pengemis, keterbatasan fasilitas panti rehabilitasi, dan kurangnya pendamping sosial yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menjalankan Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran kelompok pengemis. Program ini ditujukan bagi orang-orang yang mengalami masalah sosial, termasuk pengemis agar mereka bisa keluar dari kehidupan di jalan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi kepada para pengemis agar mereka dapat hidup mandiri. Namun, sejauh mana program ini telah berjalan dengan efektif belum banyak dikaji secara mendalam.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis yang terjaring razia merupakan pengemis musiman yang datang dari luar daerah, dan tidak sedikit pula yang kembali mengemis setelah menjalani rehabilitasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi program rehabilitasi sosial yang telah dirancang. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi program ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dijalankan sesuai dengan perencanaan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya bagi para penerima manfaat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial bagi pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mewujudkan kota yang lebih tertib, manusiawi, dan sejahtera.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah suatu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari program tersebut terhadap para penerima manfaat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara:

1. Wawancara: Peneliti bertanya langsung kepada narasumber untuk mengetahui pendapat dan pengalaman mereka.
2. Observasi (pengamatan): Peneliti melihat langsung kegiatan atau proses dalam program.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen atau arsip.

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Pendamping sosial atau pekerja sosial dan Pengemis atau eks-pengemis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menangani pengemis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial, pendamping sosial, serta beberapa pengemis yang pernah mengikuti program. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pendataan pengemis, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan sosial. Program ini bertujuan agar para pengemis bisa berubah menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak lagi kembali ke jalan.

Berdasarkan hasil temuan dilihat dari Tingkat Partisipasi Pengemis dalam Program Rehabilitasi Sosial, maka data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya, hanya 3 orang pengemis yang tercatat menerima manfaat dari program rehabilitasi sosial pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi pengemis dalam program tersebut, mengingat jumlah pengemis yang ada di Kota Palangka Raya jauh lebih banyak. Rendahnya tingkat partisipasi pengemis dalam program rehabilitasi sosial menunjukkan adanya ketidakpercayaan atau ketidakminatan dari para pengemis terhadap program ini. Beberapa pengemis mungkin merasa bahwa program ini tidak memberikan solusi jangka panjang atau mereka merasa lebih nyaman hidup di jalan karena tidak memiliki dukungan sosial atau ekonomi yang memadai. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai manfaat jangka panjang dari program rehabilitasi juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang ada di Kota Palangka Raya sangat terbatas. Panti rehabilitasi tidak mampu menampung seluruh pengemis yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jumlah pendamping sosial yang terbatas menyebabkan kualitas rehabilitasi menjadi kurang maksimal, karena pendamping sosial tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pengemis. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program secara maksimal. Selain itu, jumlah pendamping sosial yang terbatas menyebabkan program rehabilitasi tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Pendamping sosial memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi, baik dalam hal pembinaan keterampilan maupun dalam memberikan dukungan psikososial.

Banyak pengemis yang terjaring dalam program rehabilitasi adalah pengemis musiman yang datang dari luar daerah. Pengemis jenis ini hanya berada di Palangka Raya untuk waktu yang singkat dan tidak memiliki ikatan sosial yang kuat di kota tersebut, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka menjadi sulit. Karena mereka hanya berada dalam jangka waktu tertentu, program rehabilitasi menjadi kurang efektif untuk membantu mereka keluar dari kehidupan mengemis secara permanen. Mereka sering kali kembali mengemis setelah musim berlalu, yang mengindikasikan bahwa program rehabilitasi belum mampu menyentuh akar masalah pengemis musiman ini secara komprehensif.

Program rehabilitasi menyediakan pelatihan keterampilan bagi pengemis, namun banyak dari mereka yang tidak dapat memanfaatkan keterampilan yang dipelajari karena terbatasnya peluang kerja yang layak di Kota Palangka Raya. Selain itu, pengemis yang telah dilatih sering kali tidak memiliki modal atau jaringan sosial untuk memulai usaha atau mencari pekerjaan. Selain itu, banyak pengemis yang tidak memiliki modal atau akses ke pasar kerja yang layak, sehingga keterampilan yang mereka pelajari tidak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pegawai Dinas Sosial mengakui bahwa program ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Selain itu, sulit untuk mengubah pola pikir pengemis yang sudah terbiasa hidup di jalan. Banyak dari mereka yang kembali mengemis meskipun sudah ikut pelatihan, karena merasa hasil dari pelatihan tidak cukup menjamin kebutuhan hidup mereka. Namun demikian, program ini tetap memberikan dampak positif. Ada beberapa pengemis yang berhasil berubah dan kini bekerja secara mandiri, meskipun jumlahnya belum banyak. Ini menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk berhasil, asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, program rehabilitasi sosial ini sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama dari segi fasilitas, pendanaan, dan strategi pendekatan kepada para peserta. Pendekatan yang lebih personal dan dukungan lanjutan setelah pelatihan bisa membantu pengemis beradaptasi dan membangun kehidupan yang lebih baik di luar jalanan.

KESIMPULAN

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai kendala dalam pencapaiannya. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pengemis, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, pengemis musiman yang sulit dijangkau, serta kesulitan dalam reintegrasi sosial menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan juga belum sepenuhnya efektif karena terbatasnya kesempatan kerja dan dukungan pasca-rehabilitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek: Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi agar dapat menampung lebih banyak peserta. Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping sosial untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif dan personal. Pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup dukungan psikososial yang berkelanjutan agar pengemis dapat beradaptasi dengan kehidupan normal. Program pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat dan akses yang lebih luas ke pekerjaan atau modal usaha untuk memastikan pengemis dapat hidup mandiri setelah rehabilitasi. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, program rehabilitasi sosial berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengemis di Kota Palangka Raya dan membantu mereka keluar dari kehidupan di jalan secara permanen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan pegawai yang telah membantu memberikan informasi, data, serta waktu untuk wawancara dan observasi serta Para pendamping sosial dan narasumber lain yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Bantuan dan kerja sama dari seluruh pihak di Dinas Sosial sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

Adi, I. R. (2018). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. (2023). *Statistik sosial Kota Palangka Raya 2023*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.
- Dinas Sosial Kota Palangka Raya. (2024). *Laporan tahunan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Hidayat, A., & Siregar, A. (2022). Pemberdayaan sosial gelandangan dan pengemis di perkotaan: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 45(2), 123-136.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, L., & Prasetyo, D. (2021). "Strategi Penanganan Pengemis Melalui Rehabilitasi Sosial." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 87-98.
- Prasetyo, E. (2021). Reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis melalui program rehabilitasi: Perspektif sosial dan ekonomi. *Jurnal Sosial Indonesia*, 40(4), 98-113.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS)*.
- Rahmawati, F. (2016). "Dampak Program Pembinaan Sosial terhadap Perubahan Perilaku Pengemis." *Jurnal Pengembangan Sosial*, 8(2), 101-110.
- Rohmah, L., & Haryanto, B. (2022). Keterbatasan program pemberdayaan ekonomi pada gelandangan dan pengemis di perkotaan: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 29(2), 150-165.
- Santoso, A. (2020). "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 45-56.
- Soeprapto, T., & Widodo, S. (2020). *Rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, S. (2022). *Kebijakan Sosial: Analisis dan Implementasi Program Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.